

DILEMA KENAIKAN BBM **Maria Magdalena Minarsih*)**

Abstrak

Setiap bulan Januari pemerintah selalu mengajukan RAPBN ke DPR, dimana dalam RAPBN tersebut diajukan rencana biaya dan pendapatan untuk 1 tahun ke depan. Dalam RAPBN yang diajukan termuat juga asumsi-asumsi yang berlaku. Salah satu asumsi yang digunakan untuk menghitung harga BBM adalah harga minyak dunia berkisar USD 80 per barel, sedangkan saat ini harga minyak dunia diatas USD 100 per barel. Dalam perjalanan waktu selama Januari sampai April kenyataannya asumsi tersebut berubah, sehingga harus diadakan penyesuaian dalam APBN. Harga BBM harus dinaikkan agar subsidi tidak terlalu besar. Informasi kenaikan tersebut mengundang pro kontra di masyarakat dan anggota dewan. Pemerintah menaikkan harga BBM dengan pertimbangan agar subsidi BBM tidak terlalu besar, bagi masyarakat miskin pemerintah memberikan BLT (Bantuan Tunai Langsung). Dalam kenyataannya bantuan yang diberikan pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran, karena yang menerimanya justru bukan dari masyarakat miskin. Keputusan apapun yang diambil Pemerintah hendaknya berpuhak pada rakyat.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan BBM adalah :

- 1. Pemerintah harus membuat perencanaan yang matang tentang BBM baik mengenai penggunaan maupun untuk mencari sumber minyak baru atau mencari alternative pengganti BBM.*
- 2. Penghematan subsidi BBM digunakan untuk perbaikan infrastruktur dan pendidikan, karena masih banyak masyarakat yang belum dapat menikmati pendidikan. Infrastruktur yang ada perlu diperbaiki. Dengan infrastruktur yang memadai akan memperlancar perekonomian.*
- 3. Perlunya penghematan belanja pemerintah, karena belanja pemerintah membengkak dengan adanya tambahan pegawai di lingkungan kepresidenan (wakil menteri, satgas dll)*

Kata Kunci: RAPBN, BBM, BLT

PENDAHULUAN

Baru saja rencana kenaikan BBM ditangguhkan karena desakan massa yang begitu kuat dan keputusan sidang paripurna DPR yang memutuskan untuk menunda kenaikan tersebut, meskipun pemerintah sudah menyampaikan informas

*) Jurusan Manajemen FE Universitas Pandanaran

ke masyarakat bahwa kenaikan BBM harus dilakukan untuk menjaga cadangan devisa negara agar tidak deficit. Sebelum keputusan tersebut para anggota DPR melakukan pemungutan suara untuk dua pilihan. Pilihan pertama adalah tetap pada substansi pasal 7 ayat 6 RUU APBN

Perubahan 2012 yang tidak memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Pilihan kedua adalah menambahkan Ayat 6a yang menyatakan bahwa pemerintah bisa menyesuaikan harga BBM jika harga rata-rata minyak mentah di Indonesia (ICP) naik atau turun hingga lebih dari 15 persen dalam waktu enam bulan. Sebagian besar anggota DPR memilih opsi kedua, dimana pemerintah masih diberi kesempatan untuk menaikkan harga BBM jika harga rata-rata minyak dunia naik atau turun 15 %. Meskipun terjadi penundaan , harga barang-barang yang sudah terlanjur naik sulit untuk diturunkan lagi.

Berbicara mengenai cadangan devisa yang deficit, Megawati Institute berpendapat bahwa jebolnya APBN lebih disebabkan oleh adanya penambahan subsidi listrik yang naik hingga 107,1 persen dan kenaikan Cost Recovery sebesar 25,5 Persen, Program BLSM dan Subsidi Angkutan Umum yang secara keseluruhan mencapai Rp 106,3 triliun

Kenaikan BBM hampir selalu terjadi setiap kali harga minyak dunia mengalami kenaikan, kita memang sangat tergantung pada harga minyak dunia, meskipun kita dapat memproduksi sendiri. Hal tersebut dikarenakan kita tidak dapat mengolahnya. Di samping itu pengelolaan BBM yang tidak efisien serta tingkat pengurusan cadangan minyak yang mencapai delapan kali lebih tinggi dibanding laju eksplorasi negara-negara penghasil minyak utama dunia seperti Arab Saudi dan Libia menyebabkan Indonesia harus berhati-hati dalam mengelola cadangan minyaknya. Penolakan yang terjadi di kalangan masyarakat dan mahasiswa menandakan bahwa masyarakat kita belum siap untuk menerima kenaikan harga bahkan masyarakat kita belum siap untuk kekurangan BBM.

PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan BBM adalah :

1. Pengelolaan BBM sangat tidak efisien serta tingkat pengurusan cadangan minyak mencapai delapan kali lebih tinggi dibanding laju eksplorasi negara-negara penghasil minyak utama dunia seperti Arab Saudi dan Libia.

2. Dengan cadangan minyak berkisar empat miliar barel, Indonesia memproduksi minyak rata-rata satu juta barel per hari (bph). Dengan begitu, reserve to production ratio (RPR) berada pada angka empat. Angka itu jauh di bawah Arab Saudi dan Libia. Dengan cadangan minyak mencapai 265 miliar barel, Arab Saudi hanya memproduksi minyak rata-rata delapan juta bph atau tingkat RPR-nya mencapai 35. Adapun Libia, dengan cadangan minyak 46 miliar barel dan produksi 1,5 juta bph, memiliki tingkat RPR 30. Artinya, selama ini, negara menguras cadangan minyak lebih kurang delapan kali lebih cepat dari Arab Saudi dan Libia. Sayangnya, hal itu tidak diikuti dengan ekstensifikasi ladang-ladang minyak baru. Eksploitasi mencapai puncaknya pada periode 1975-1976 dengan tingkat produksi minyak di wilayah barat 250.000 bph. Sejak itu, produksi minyak nasional terus menurun, dan kini hanya menghasilkan 70.000 bph. Penurunan produksi minyak nasional itu sebenarnya masih ditutupi dari pengurasan cadangan Duri yang dimulai sekitar 1980-an dengan tingkat produksi sekitar 400.000 bph. Eksploitasi Duri membuat produksi nasional kembali mencapai puncaknya pada 1995-1996, yakni 1,6 juta bph. Kini, lapangan Minas dan Duri hanya menghasilkan 360.000 bph. Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu diharapkan dapat berproduksi 165.000 bph pada 2014 dari 20.000 bph saat ini. Dengan konsumsi bahan bakar minyak yang di atas 1,2 juta bph dan kemampuan kilang domestik hanya 700.000 bph, sisa kebutuhan BBM harus diimpor. Kemudian, meski cukup banyak ditemukan ladang minyak baru, ukurannya masih jauh lebih kecil. Sebaliknya, eksplorasi yang belakangan gencar dilakukan di kawasan Indonesia bagian timur malah menghasilkan penemuan cadangan-cadangan gas dalam jumlah besar, di antaranya Tangguh, area deepwater Selat Makassar (Gandang, Gendalo, Gehem, dll), Masela (Laut Timor), dan terakhir oleh Genting Oil di Bintuni. Cadangan minyak yang berukuran cukup besar kebanyakan berada di kawasan barat, seperti lapangan Minas, Duri, dan Cepu.
3. Rendahnya penemuan cadangan minyak disebabkan penurunan investasi migas di Tanah Air karena proses investasi migas yang berbelit-belit pasca penerapan UU Migas No 22 Tahun 2001. Dengan UU tersebut, proses investasi bisa menghabiskan waktu lima tahun karena melewati birokrasi. Padahal, dengan UU Migas yang lama, UU 8 Tahun 1971, hanya diperlukan waktu tiga bulan. Investasi migas di Indonesia bahkan tercatat sebagai

salah satu yang terburuk di dunia. Berdasarkan survei Global Petroleum pada 2010, Indonesia ada di urutan ke-111 dari 133 negara.

4. Tidak jelasnya road map cadangan minyak Indonesia. Road map itu sebenarnya sangat vital karena, berdasarkan Ikatan Ahli Geologi (IAI), cadangan minyak bumi Indonesia tinggal empat miliar barel. Bahkan bisa saja malah sekitar 3,7 miliar barel. Diperkirakan tinggal 10 tahun lagi cadangan minyak kita. Apalagi produksi minyak RI hanya sekitar 945.000 barel per hari. Yang memprihatinkan lagi, anggaran pencarian sumur minyak hanya 0,07 persen dalam APBN. Seharusnya pemerintah membuat rencana induk yang jelas dari sekarang. Cari bagian yang perlu dikurangi subsidiya dan rencanakan dari sekarang. Bila Indonesia terus mengabaikan hal itu, bukan tidak mungkin ke depan malah akan mengimpor 1,3 juta barel per hari minyak bumi. Padahal konsumsi minyak tentunya akan terus tumbuh karena setiap tahun ekonomi naik dan jumlah penduduk bertambah. Pemakaian minyak di Indonesia minus 400.000 barel setiap tahunnya.
5. Anggaran untuk masyarakat miskin dan rentan masih sangat kurang apabila dibandingkan dengan subsidi bahan bakar. Tahun 2011, pemerintah menghabiskan 2,2 persen produk domestik bruto (PDB) untuk subsidi bahan bakar, dan hanya 0,5 persen PDB untuk program-program bantuan social.
6. Perbedaan harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi yang jauh ini dikhawatirkan meningkatkan praktik penyelundupan BBM bersubsidi di daerah perbatasan dan penjualan BBM bersubsidi ke industry.
7. Usulan penurunan penerimaan pajak sebesar Rp 25,8 triliun dan PNB Gas sebesar Rp 6,1 triliun. kenaikan subsidi listrik yang mencapai 107,1 persen sangat tidak sebanding dengan kenaikan harga BBM yang hanya sebesar 30 persen. Sementara pada sisi lain kenaikan cost recovery juga tidak sebanding dengan terjadinya penurunan lifting minyak dari 950.000 bph menjadi 930.000 bph.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan bahwa. dalam RAPBN 2012, pemerintah menyiapkan beberapa kebijakan, seperti menaikkan harga bahan bakar minyak dan listrik, termasuk memangkas belanja instansi.

Tujuannya agar budget tahun ini tetap aman. Bambang memberikan gambaran terburuk jika pemerintah tidak mengeksekusi kebijakan itu. Misalnya, defisit anggaran bertambah Rp 175,9 triliun dari perkiraan awal di APBN 2012 sebesar Rp 124,02 triliun. "Tanpa kebijakan apa-apa, defisit bisa membengkak menjadi Rp 299,9 triliun atau 3,6% dari produk domestik bruto (PDB). Defisit anggaran tersebut belum memperhitungkan defisit dari APBD di seluruh Indonesia, yang secara total mencapai 0,5% dari PDB. Karena itu, dalam nota keuangan RAPBN-P 2012 yang diajukan ke DPR, pemerintah mengusulkan beberapa kenaikan harga, agar defisit bisa ditekan menjadi Rp 190,1 triliun atau sekitar 2,23% dari PDB, lonjakan defisit tersebut berasal dari belanja negara yang makin tambun, yakni bertambah Rp 169,4 triliun dari perkiraan sebelumnya. Jatah subsidi BBM dan listrik juga bertambah sekitar Rp 120,9 triliun.

Kebijakan pemerintah membagikan dana bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga miskin untuk meminimalkan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dinilai tidak tepat. Apalagi, berdasarkan pengalaman, BLT justru disalurkan kepada warga yang tidak berhak.

Pemerintah seharusnya mengalihkan alokasi subsidi harga BBM untuk pembangunan infrastruktur yang langsung bersentuhan dengan kegiatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur itu diharapkan mampu menopang kegiatan perekonomian masyarakat, terutama warga tak mampu. Hal tersebut disampaikan ekonom dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Pande Radja Silalahi dan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Infrastruktur, Konstruksi, dan Properti Zulkarnain Arief, secara terpisah,

Pande Radja mengingatkan, meski BLT tidak menjadi fokus utama pemerintah, pemberian bantuan secara langsung tersebut akan membantu masyarakat miskin dalam jangka pendek. Namun, Pande mengingatkan, pendistribusian BLT atau BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) rawan salah sasaran. BLT juga jangan sampai dimanfaatkan untuk menjadi instrumen kepentingan politik pemerintah. "BLT harus diberikan tepat sasaran dan benar-benar masyarakat miskin yang menerimanya. Anggaran BLT ini tidak boleh menggerus alokasi untuk pembangunan infrastruktur yang lebih diperlukan untuk pembangunan perekonomian masyarakat sesungguhnya. Infrastruktur sebagai penopang perekonomian masyarakat harus dipenuhi. Apalagi hingga kini, realisasi proyek pembangunan yang dilakukan kementerian dan lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah (pemda) belum berjalan optimal.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur juga harus merata di berbagai sektor perekonomian, misalnya pembangunan infrastruktur untuk mendorong sektor transportasi, pertanian, dan kelautan yang langsung bersentuhan dengan kegiatan masyarakat. Jika anggaran penghematan subsidi BBM ini dialihkan untuk pembangunan perikanan, bakal terjadi efek lain yang positif dan nantinya tercipta kegiatan perekonomian baru bagi masyarakat, khususnya nelayan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan desa atau perbaikan saluran irigasi pertanian dan waduk-waduk juga mendesak dilakukan. Hal ini juga bisa mendongkrak produksi pangan nasional, sehingga Indonesia tidak lagi dianggap sebagai negara importir pangan saja. Untuk itu, dibutuhkan peran pemerintah daerah guna mengimplementasikan kebijakan dan cita-cita pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan dan perekonomian yang merata di berbagai daerah."Sejak diberlakukannya otonomi daerah, kebijakan pemerintah pusat dan daerah sering bertentangan. Untuk itu, kebijakan apa pun yang bertujuan membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut, hendaknya hal ini didukung oleh kebijakan yang sejalan

Pande mengatakan, pembangunan infrastruktur dipastikan akan menyerap banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan cara ini, kata dia, program pembangunan ekonomi dan pengurangan jumlah pengangguran bisa berjalan optimal. Ia menambahkan, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk mengurangi beban baru bagi perekonomian masyarakat pascakenaikan harga BBM bersubsidi. Pemerintah, menurut dia, berkewajiban menekan lonjakan harga bahan kebutuhan pokok dan barang kebutuhan masyarakat yang terkerek naik mengikuti harga BBM. Hal senada juga disampaikan Zulkarnain Arief. Dia mengingatkan agar pemerintah menggunakan dana hasil penghematan atas kenaikan harga BBM itu secara tepat. Menurut dia, pemerintah harus memberikan kompensasi yang tepat kepada masyarakat dan pengusaha atas kenaikan harga BBM."Jangan hanya berupa BLT, tetapi juga harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Alokasi dana hasil penghematan subsidi BBM untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut, menurut dia, harus segera dilakukan. Ini mengingat kondisi infrastruktur di Indonesia saat ini masih jauh memadai "Kondisi jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara umumnya buruk. Hal ini mengganggu mobilisasi dan distribusi barang. Jelas, ini akan menambah beban bagi masyarakat dan pelaku usaha," ujar dia. Ia yakin, jika dana hasil penghematan subsidi BBM tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur baru dan

memperbaiki kondisi yang ada saat ini, maka dampak kenaikan harga BBM bisa teratasi tidak dalam waktu lama. Untuk itu, dia meminta pemerintah mengalokasikan dana-dana penghematan subsidi BBM untuk sektor dan kalangan yang sangat membutuhkan, sehingga bisa menggerakkan perekonomian masyarakat secara keseluruhan. "Dana ini bukan dihabiskan untuk sektor konsumsi saja," ucapnya.

Sementara itu, ekonom sekaligus CEO lembaga riset perekonomian independen EC-Think Iman Sugema mengatakan, sebenarnya pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM, tetapi pemerintah bisa melakukan pengaturan pembelian BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sehingga pemerintah lebih fokus terhadap pemberian subsidi BBM. Menurut dia, solusi alternatif bagi pemerintah dengan cara memisahkan SPBU menjadi dua jenis, yaitu SPBU khusus angkutan umum (pelat kuning) dan angkutan barang serta SPBU khusus mobil pribadi. "Subsidi BBM itu nantinya hanya diperuntukkan bagi angkutan umum dan barang, sedangkan mobil pribadi tidak. Pemisahan SPBU ini juga tidak perlu dilakukan dengan cara yang sulit," tuturnya.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Franky Sibarani mengatakan, kenaikan harga BBM mulai 1 April 2012 tidak akan banyak berpengaruh pada dunia industri, khususnya untuk industri makanan dan minuman. "Kenaikan harga BBM tidak akan banyak berpengaruh, mungkin hanya berkisar 3 persen untuk distribusi, karena untuk industri telah menggunakan harga internasional sejak November 2011 lalu," kata dia. Menurut dia, terpengaruhnya industri makanan dan minuman akibat dari kenaikan harga BBM itu hanya pada sisi transportasi atau biaya distribusi. Namun, apabila ada kenaikan harga yang cukup tinggi, itu dikarenakan faktor yang lain. Dia menambahkan, naiknya harga makanan dan minuman tidak bisa diakibatkan oleh satu faktor saja. Apalagi harga minyak di pasar internasional belum juga bergerak turun. Otomatis dengan kalkulasi harga di APBN-P 105 dolar AS per barel akan terus menyesuaikan harga di pasar internasional. Dan pemerintah tidak punya daya untuk menghalangi kenaikan harga minyak di pasar internasional.

Sebenarnya masyarakat harus bijak melihat persoalan. Bahkan cenderung harus bijak menolak kenaikan harga bahan bakar. Pemerintah sudah tidak mungkin lagi menunda kenaikan itu karena sosialisasinya juga sudah cukup kencang. Kalau kemudian keputusan pemerintah itu dilawan dengan demonstrasi besar-besaran lalu timbul risiko sosial pasti akan merugikan semua pihak. Sebab jika sudah seperti ini pemerintah tidak pernah membatalkan keputusannya.

Masyarakat harus menerima. Itulah yang diinginkan pemerintah. Pada prinsipnya itu tidak masalah. Hanya saja di balik kenaikan harga itu pasti ada dampaknya. Itulah yang harus maksimal dipikirkan pemerintah jangan sampai menjadi masalah baru lagi.

Kalau ingin APBN terlihat bagus, defisit makin kecil otomatis menaikkan harga bahan bakar adalah solusi. Namun di balik itu pasti harus ada cara lain yang bisa dilakukan untuk menopang kondisi kehidupan masyarakat. Jangan dibiarkan makin terlunta-lunta dan tak bisa mengikuti kenaikan harga barang di pasar. Sebab jauh hari ketika pemerintah mengumumkan akan menaikkan harga bahan bakar, otomatis di pasar pedagang sudah mendahuluinya. Maunya pemerintah jangan hanya bijak dengan anggarannya. Lalu menyuruh rakyat untuk bijak menyikapi. Perlu ada batas toleransi. Rakyat pun kalau terus-terus ditekan dengan kenaikan harga pasti akan ribut dan berontak. Apalagi kenaikan harga itu paling terasa di masyarakat perkotaan. Mungkin di perdesaan kenaikan harga bahan bakar tidak seberat di kota. Sebab biaya kebutuhan lebih sedikit. Sementara kalau rakyat perkotaan marah akan membuat masalah baru. Dan pasti pemerintah sekarang tidak mau mengulangi peristiwa yang terjadi pada tahun 1998 dimana terjadi demonstrasi besar-besaran yang menolak kenaikan harga BBM. Biaya sosial sudah terlalu tinggi untuk pulih dari krisis lalu.

Beberapa alasan mengapa pemerintah menaikkan harga BBM adalah :

1. Harga minyak dunia yang terus merangkak naik, sehingga APBN 2012 harus disesuaikan. Saat ini kondisi ekonomi global makin tak menentu, terutama akibat krisis ekonomi. Harga minyak dunia pun terus melonjak, sehingga semua asumsi APBN 2012 tidak pas lagi
2. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam APBN 2012 sudah tidak sesuai lagi seperti harga BBM yang berkisar USD 100 lebih, inflasi, dan nilai tukar rupiah. Jika tidak dilakukan penyesuaian maka sasaran yang telah ditetapkan antara DPR dan pemerintah tidak bisa tercapai.
3. APBN 2012 akan terjadi deficit yang besar sehingga fiscal tidak sehat dan akhirnya mengganggu perekonomian secara keseluruhan.
4. Jika tak dilakukan kenaikan harga BBM bersubsidi, maka konservasi energi akan terancam. Peralnya, dengan jumlah cadangan minyak di Indonesia yang makin berkurang, konsumen tak akan bergeming untuk memakai BBM bersubsidi.

Solusi yang diambil pemerintah berkaitan dengan kenaikan BBM dan penghematan APBN adalah :

1. Memberikan Bantuan Tunai Langsung (BLT) kepada warga miskin (meskipun kebijaksanaan ini oleh beberapa pengamat tidak efektif karena tidak tepat pada sasarannya). Bantuan ini bisa membuat ketergantungan dan malas bagi penerimanya.
2. Pemangkasan anggaran yang dianggap tidak penting. Solusi ini belum sepenuhnya berjalan karena pembengkakan anggaran justru adanya tambahan /beban biaya dari pemerintah misalnya : adanya tambahan biaya dengan adanya penambahan wakil menteri, satgas yang dibentuk pemerintah.

Dampak adanya kenaikan BBM :

1. Harga barang-barang kebutuhan pokok naik sebelum kenaikan BBM dijalankan, sehingga mendorong kenaikan inflasi.
2. Faktor-faktor yang berkaitan langsung maupun tidak langsung ikut naik seperti transportasi, bahan bangunan, obat-obatan dll. Ini yang menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah semakin terjepit.
3. BLT tidak banyak membantu karena hanya diterima selama beberapa bulan saja dan masyarakat miskin banyak yang tidak menerimanya. BLT terkadang membuat orang jadi malas dan hanya mengandalkan pada bantuan pemerintah.
4. Harga belum naik spekulasi sudah menimbun bahan bakar minyak. Walau belum terindikasi secara penuh oleh aparat kepolisian.
5. Aksi demonstrasi akan muncul dimana-mana yang berarti biaya sosial yang harus ditanggung banyak orang akan semakin berat. Andai Jakarta dan kota-kota lain diterpa demonstrasi besar-besaran setiap hari berarti jalanan kota dan risiko kerusakan sangat mudah timbul. Belum lagi bentrokan antara aparat keamanan dengan pendemo. Ujungnya adalah kekecewaan sosial dan tak akan berujung.
6. Penundaan pengumuman tidak saja memunculkan ketidakpastian tapi juga membuat pengusaha kesulitan mengembangkan bisnis. Sebab mereka masih sulit menghitung biaya yang harus ditanggung pasca kenaikan BBM. Harusnya kalau memang naik silakan pemerintah mengumumkan hari itu juga. Jangan digantung seperti sekarang.

Beberapa alternative yang bisa diterapkan dalam kaitannya dengan rencana kenaikan BBM antara lain :

1. Pada prinsipnya penulis setuju dengan rencana kenaikan BBM sepanjang itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah dapat menggunakan penghematan subsidi untuk memperbaiki infrastruktur dan pendidikan.
2. Bagi masyarakat yang menggunakan mobil mewah dan Instansi pemerintah tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi, ini untuk menghemat anggaran.
3. Pemberian BLT sebaiknya digantikan dengan pelatihan ketrampilan yang melibatkan kaum muda sebagai generasi penerus.
4. Membuat perencanaan anggaran yang lebih akurat serta merancang rencana induk kemandirian (keswadayaan) energi dan bahan bakar. Caranya ialah mengeksplorasi energi-energi alternatif minyak.
5. Penelitian Bank Dunia menunjukkan, apabila masyarakat Indonesia memberi kompensasi berdasarkan keterampilan dan kemampuan, serta bukan berdasarkan gender, produktivitas para pekerja dapat meningkat hingga 14 persen. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.

Jika menengok beberapa tahun yang lalu dimana Indonesia pernah menjadi anggota OPEC yang menandakan kalau Indonesia pernah berjaya dalam produksi minyak dan diakui dunia. Namun sekarang Indonesia harus mengimport minyak dari hasil produksi sendiri karena Indonesia tidak bisa mengolah minyak tersebut.

Harapan ke depan Indonesia bisa mengelola minyak mentah sendiri, sehingga tidak tergantung pada Negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- <http://bio-sanjaya.blogspot.com/2012/03/hasil-rapat-paripurna-demo-bbm.html>
<http://globalkatulistiwa.com/2012/03/26/kenaikan-bbm-hari-ini-bakal-diputuskan-pemerintah-dpr/>
<http://makassar.antaranews.com/berita/36507/pembatasan-atau-kenaikan-bbm-tetap-resahkan-masyarakat>

<http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/03/30/148159/Ini-Peta-Pandangan-Fraksi-DPR-Soal-Kenaikan-BBM>

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 12 tahun 2012